

Urgensi Perguruan Tinggi dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Mujiburrahman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: mujiburrahman@ar-raniry.ac.id

Abstract

The Indonesian nation is being hit by a moral crisis. This is due to mistakes in both policy and operational levels in education, economics, politics and law. Educational institutions especially accused of failing to shape the character, moral and noble character of the students. This phenomenon seems to be the basis for universities to think, implement and develop the paradigm and character education system in line with the spirit of Islamic sharia values. Through Islamic education-based educational model that actualized in the process of education in total and comprehensive provide wide space and opportunity to shape the character and personality of children (students) in accordance with the demands of Islamic values. So in the end, the orientation and the ultimate goal of educational activities to realize the individual (Muslim person) and members of society (Muslim community) who have a high quality of faith, noble, character, knowledgeable and professional can be achieved.

Keywords: College; character; nation.

Abstrak

Bangsa Indonesia sedang dilanda krisis moral. Hal ini diakibatkan oleh adanya kekeliruan baik pada tataran kebijakan maupun operasional di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan hukum. Lembaga pendidikan khususnya dituding gagal membentuk karakter, moral dan akhlak mulia anak didik. Fenomena ini kiranya menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk memikirkan, melaksanakan dan mengembangkan paradigma dan sistem pendidikan karakter yang sejalan dengan ruh nilai-nilai syariat Islam. Melalui model pendidikan berbasis syariat Islam yang teraktualisasi dalam proses pendidikan secara total dan menyeluruh memberi ruang dan kesempatan yang luas untuk membentuk karakter dan kepribadian anak (mahasiswa) sesuai dengan tuntutan nilai-nilai Islam. Sehingga pada akhirnya, orientasi dan tujuan akhir aktifitas pendidikan untuk mewujudkan individu (pribadi muslim) dan anggota masyarakat (komunitas muslim) yang memiliki kualitas keimanan yang tinggi, berakhlak mulia, berkarakter, berilmu dan profesional dapat dicapai.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi; Karakter; Bangsa.

PENDAHULUAN

Mencermati kondisi Indonesia dewasa ini menunjukkan bahwa bangsa ini – yang sering dibanggakan sebagai bangsa besar – sedang dilanda krisis multi dimensi. Krisis moral bangsa tersebut menurut para pakar (pendidikan, ekonom, politisi, dan ahli hukum) diakibatkan oleh adanya kesalahan di bidang

pendidikan, ekonomi, politik dan hukum¹ Artinya terdapat beberapa kekeliruan baik pada tataran kebijakan maupun operasional pada empat bidang tersebut. Kesalahan ini lebih jauh mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya sikap dan perbuatan negatif di tengah kehidupan masyarakat yang berujung pada munculnya krisis moral bangsa.

Sudarminta mengemukakan ada tiga fenomena yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat memberi sumbangsih dan kontribusi bagi bangsa terpuruk dalam krisis moral. Tiga gejala sosial itu adalah: (1) masih merajalela praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, (2) memudarnya kepekaan dan amalan social hamper menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama kaum elit, para pemimpin bangsa serta pejabat publik umumnya; dan (3) terjadinya degradasi nilai kemanusiaan yang menghingapi cukup banyak anak bangsa.² Penyakit KKN sudah begitu mendarah daging dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat serta menjadi sumber berbagai masalah sosial lainnya yang mengakibatkan timbulnya krisis dan kehancuran bangsa ini.

Dewasa ini ketiga penyakit tersebut, terutama KKN bagaikan penyakit kronis yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan ia terus berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang juga tidak mudah untuk dihentikan. Pemberitaan tentang berbagai kasus korupsi dalam skala besar dan kecil di tanah air dewasa ini terus diberitakan oleh media berbagai media. Diantaranya, seperti kasus Korupsi E-KTP yang menyeret Ketua DPR RI, Setna Novanto dan sejumlah kepala daerah (Bupati dan Wali Kota) yang tertangkap tangan oleh KPK, memudahkan kita memahami betapa banyaknya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para aparatur Negara di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil kajian dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tentang perkembangan dan penanganan kasus korupsi di Indonesia pada tahun tahun 2015, ditemukan bahwa akibat kecahatan korupsi tersebut negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3,1 triliun. Lebih jauh, Wana Alamsyah (peneliti ICW) memaparkan, kerugian dimaksud disebabkan oleh 550 kasus korupsi yang terjadi dan terungkap pada tahun 2015. Dari jumlah kerugian

¹Al-Chaidar. *Reformasi prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*. (Jakarta: Darul Falah, 1998), hal. 100-120.

²Sudarminta, *Pendidikan Moral Sekolah: Jalan Keluar Mengatasi Krisis Moral Bangsa, dalam* Tonni D. Widiastono (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Astra Indonesia dan Kompas, 2004), hal. 106.

negara tersebut, sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp. 1,8 triliun. Adapun dari jumlah 550 kasus korupsi, tersangka yang terlibat kasus tersebut berjumlah 1.124 orang.³

Prilaku korup yang terjadi di Indonesia tersebut bukanlah muncul begitu saja secara tersendiri, namun ada faktor x lain yang menyebabkan tumbuh dan berkembang penyakit korupsi ini. Hasil analisis lebih jauh, maka segera akan diketahui bahwa ketiga “penyakit” yang bagai telah membudaya tersebut bukanlah penyebab awal terjadinya krisis dan kehancuran bangsa ini. Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme ada penyebabnya. Penyebab awal adalah kualitas akhlak (moral) anak bangsa yang rendah. Dekadensi moral yang sangat parah itulah sebagai salah satu faktor penyebab seseorang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan berbagai tingkat kejahatan lainnya. Beranjak dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa penyebab awal krisis adalah kebrobrokan akhlak dan hancurnya karakter anak bangsa.

Pada sisi lain, rusaknya moral bangsa ini juga terlihat dari prilaku generasi muda, mahasiswa dan pelajar, dimana berbagai kejahatan dan tingkat kriminalitas yang terjadi di negeri ini yang tidak jarang dilakukan oleh para pemuda, mahasiswa dan pelajar. Tawuran mahasiswa dan pelajar yang marak terjadi di berbagai kota, penyalahgunaan narkoba, meningkatnya seks bebas di kalangan pelajar, serta munculnya berbagai kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat seperti Komunitas Geng Motor di Jawa dan Komunitas Punk di Aceh, merupakan contoh kecil dari sejumlah problem moral generasi muda bangsa ini. Munculnya berbagai problem dan “penyakit sosial” masyarakat ini lagi-lagi mengusik dunia pendidikan di negeri ini, karena lembaga pendidikan kembali dituding gagal membentuk karakter, moral dan akhlak mulia anak didik. Fenomena ini kiranya menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk memikirkan dan merancang pendidikan karakter di lembaga ini secara serius dan profesional.

PEMBAHASAN

1. Arah dan Tujuan Pendidikan di Perguruan Tinggi

Kebaradaan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan formal memiliki fungsi dan tujuan utama yaitu melakukan proses pendidikan yang berkualitas, terukur dan berkesinambungan untuk menghasilkan para lulusan

³Laporan ICW, *Indonnesia Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1 Triliun*,

<https://antikorupsi.org/id/news/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun>

yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, memiliki moralitas yang luhur (baik dan berkarakter), serta dibekali dengan kemampuan skill (keterampilan) yang mumpuni. Prototipe lulusan perguruan tinggi tersebut diformat sesuai dan sejalan dengan nilai yang terkandung dalam system pendidikan nasional (sisdiknas). Pada pasal 3 Undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Konsekuensi logis dari tujuan pendidikan nasional di atas, pemerintah melalui berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan tinggi (universitas) memiliki tanggungjawab yang besar dalam merancang sistem pendidikan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut secara sempurna. Dengan demikian, diharapkan perguruan tinggi dapat menjadi lembaga pendidikan yang efektif bagi pembentukan dan pengemblengan individu yang nantinya dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan dengan baik dalam lingkungan masyarakatnya.⁵

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, maka sistem pendidikan yang dijalankan di perguruan tinggi yang berbasis pada Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian). Sejalan dengan ruh dan substansi kehadiran perguruan tinggi tersebut, maka implementasinya pada ranah pendidikan khususnya harus mampu memberdayakan dan meningkatkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik para mahasiswa. Pengayaan potensi kognitif mahasiswa ditekankan pada peningkatan intelektual (akademik) dalam rangka penguasaan konten keilmuan secara luas dan mendalam.. Aspek afektif menekankan pada ketahanan emosi, sikap, dan apresiasi nilai serta tingkat penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu dengan kebijaksanaan. Sedangkan aspek psikomotorik menekankan pada kemampuan melatih dan kemampuan untuk mengaplikasikan keilmuan dan skil secara baik dan professional.

⁴Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, <https://fadlolymasterteacher.wordpress.com/2011/10/14/uu-no-20-tahun-2003-pasal-3/>

⁵Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 222.

Beranjak dari pendidikan yang mampu mewujudkan ketiga aspek tersebut sangatlah penting, aspek dengan perkembangan psikologi modern mengenai kecerdasan manusia. Danah Zohar menyebutkan dari serangkaian data ilmiah terbaru menunjukkan adanya kecerdasan spritual (SQ) dalam diri manusia, tidak hanya kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) sebagaimana yang dipahami selama ini. Kecerdasan spritual merupakan kecerdasan yang berakar dari nilai-nilai wahyu untuk membimbing dan menempa tatanan kehidupan kita dalam siklus kehidupan yang lebih mulia dan bernanfaat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lilalamin*). Kondisi ini pada akhirnya dapat mengangkat derajat kemanusiaan kita dari manusia lain, baik dalam pandangan manusia maupun penilaian Tuhan. Sebenarnya, SQ lah yang dapat membentuk seseorang memiliki karakter yang kuat untuk menentukan pilihan, karena kecerdasan ini tidak bekerja dalam batasan situasi tertentu, tetapi memungkinkan seseorang untuk mengubah situasi dan menjadi lebih baik.⁶

Dengan demikian, ketiga kecerdasan tersebut dapat merupakan kesamaan yang ingin dicapai dalam terwujudnya pendidikan yang holistik yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Oleh karena itu perguruan tinggi memiliki peran yang besar dalam upaya menumbuhkembangkan ketiga aspek tersebut secara totalitas. Berkaitan dengan terwujudnya aspek psikomotorik ini, hanya dapat dicapai melalui suatu latihan dan amalan yang dilakukan secara sistematis dan kontinyu melalui implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi.

Nampaknya, metode pendidikan di Indonesia dianggap belum mampu mewujudkan ketiga aspek tersebut secara sinergis dan seirama. Dalam kenyataannya, sistem pendidikan sekarang ini lebih mengarah hanya pada aspek kognitif, sehingga menyebabkan terjadi ketimpangan dan pembangunan anak didik yang tidak utuh, yang pada akhirnya memunculkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Aspek-aspek tersebut lahir karena adanya kekaburan visi dan pergeseran tata nilai yang melingkupi dunia pendidikan, sehingga arah pendidikan yang ingin dicapai belum mampu melahirkan manusia yang cerdas sekaligus baik. Hal ini sebagaimana yang telah diprediksikan oleh Mohandas K. Gandhi sekitar delapan dekade yang lalu tentang adanya konsekuensi

⁶Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Kecerdasan Spiritual*, (Bandung: Mizan, 2007), hal. 3-5.

negatif (munculnya berbagai penyakit sosial) di tengah kehidupan masyarakat kalau mengabaikan dan tidak melaksanakan pendidikan karakter.⁷

Semua orang bersetuju dan memiliki pandangan yang sama bahwa kebijakan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tidak lain adalah untuk menggapai kualitas intelektual, moral, kepribadian, dan skill peserta didik (mahasiswa) yang tinggi. Kesemua aspek dan potensi peserta didik tersebut harus ditumbuhkembangkan secara sinergi, dan tidak boleh mengabaikan salah satu dari aspek tersebut. Karena ketika pengembangan suatu aspek pada peserta didik tersebut belangsung secara tidak sehat, dapat mendatangkan pengaruh yang negatif pada peserta didik. Akibat dari proses pendidikan yang tidak mengutamakan pengembangan karakter, dikhawatirkan dekadensi moral dan penyakit sosial akan semakin banyak menghinggapi masyarakat Indonesia, baik kalangan orang dewasa, mahasiswa, remaja maupun para siswa. Padahal keberadaan mereka sangat potensial sebagai generasi masa depan yang akan melanjutkan ektafek pembangunan bangsa.

2. Pendidikan Karakter dan Implementasinya di Perguruan Tinggi

Mencermati kata karakter secara kebahasaan mengantarkan kita pada penemuan kata *charasseim* yang berasal dari bahasa Yunani. Kata *charassei* ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna “memahat atau mengukir.⁸ Pengertian karakter yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata karakter mengandung makna budi pekerti, akhlak, tabiat dan sifat-sifat kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dengan sifat-sifat tersebut dapat membedakan dirinya dengan orang lain.⁹ Sementara pengertian karakter dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.¹⁰

Sedangkan dalam Kamus Psikologi sebagaimana dikutip dalam blog Info Sekolah dijelaskan:

Kata karakter yang berarti sifat, karakter, dan watak memiliki beberapa makna; (1). Satu kualitas atau sifat yang tetap dan terus

⁷Yudi Latif, *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 79.

⁸Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*, (Surakarta: Yuma Pustaka 2010), hal. 12.

⁹Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 258.

¹⁰ W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 521.

menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek atau kejadian, (2). Integrasi atau sintesa dari sifat-sifat individual dalam bentuk suatu unitas atau kesatuan, (3). Kepribadian seseorang dipertimbangkan dari titik pandang etis dan moral.¹¹

Dari berbagai pengertian karakter yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa karakter merupakan seperangkat nilai, sifat-sifat, tabiat, dan watak yang melekat dalam diri seseorang sehingga membentuk kepribadiannya (personality) secara utuh. Karakter yang muncul dan melekat pada seseorang merupakan gambaran dari sifat dan nilai yang melekat pada entitas. Ketika perilaku dan amalan baik yang dikerjakan oleh seseorang, maka secara mudah dapat dipahami bahwa kebaikan tersebut lahir atas nilai luhur yang melekat pada diri orang tersebut. Juga sebaliknya, perilaku dan perbuatan tercela yang dikerjakan oleh seseorang, juga dapat dipahami bahwa ia lahir dari personality yang memiliki sifat dan watak yang buruk.

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai moral, etika dan estetika kepada mahasiswa yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai *“the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”*. Jadi, pendidikan karakter merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis, terukur dan kontinyu dalam rangka penanaman nilai, sifat, tabiat dan moral secara integral yang diimplementasikan dalam lingkungan sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat.

Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pemetaan dan perumusan ontology, epistemology dan aksiologi keilmuan yang diajarkan kepada seluruh mahasiswa dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral agama. Eksistensi sains dan teknologi tersebut dalam tinjauan Islam mesti dipelajari dan disikapi secara tepat dan bijaksana dengan berasaskan kepada nilai-nilai ketauhidan, kemanusiaan, dan kealaman, sehingga kehadirannya dapat memberi nilai kebaikan kepada saintis itu sendiri serta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dunia serta alam lingkungannya.

¹¹ <http://infosekolahterbaru.blogspot.com/2015/07/pengertian-karakter.html>

Bukan sebaliknya, berupa kajian dan pengembangan sains dan teknologi yang bebas nilai religious, hanya mengedepankan “paradigma ilmu untuk ilmu” sehingga menghasilkan saintis yang sekuler dan tidak berkarakter, serta memberi dampak yang tidak baik terhadap perkembangan dan pencerahan peradaban manusia serta lingkungannya.¹²

Pendidikan sains secara sistematis dan efektif dapat dijadikan sebagai media untuk membangun dan memperkuat karakter bangsa (*character building*). Untuk menilai dan mengatakan seseorang sebagai individu yang berkarakter (*a person of character*) apabila sikap, kelakuan, dan perbuatannya sesuai dengan kaidah agama dan moral. Hal ini memungkinkan dilakukan dan bukan isapan jempol semata, mengingat salah satu fungsi pendidikan adalah membentuk watak dan karakter bangsa serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki setiap warganya dalam rangka mencerdaskan bangsa. Konsekuensi logis ini, maka seyogyanya paradigm dan konsep pendidikan sains islami yang dikembangkan di Indonesia mesti berbasas kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bermuara pada ketauhidan dan *rahmatan lilalamin* serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal keindonesian, demi melahirkan generasi bangsa yang beragama, berkarakter dan berbudaya.

Menurut Koesoema, setidaknya ada lima metode atau unsur yang cukup penting dalam proses implementasi pendidikan karakter, yaitu:

a. Mengajarkan.

Dalam pendidikan karakter salah satu unsur utama dan terpenting adalah memberi pemahaman tentang nilai-nilai kepada peserta didik dan mahasiswa sehingga mereka memiliki ilmu dan konsepsi tentang nilai-nilai yang menjadi modal utama bagi pengembangan kepribadiannya. Proses sosialisasi dan internalisasi nilai bukan hanya dilaksanakan secara langsung pada ruang-ruang belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Sarana lainnya yang bisa dipakai dalam membantu menyebarkan gagasan tentang nilai, misalnya melalui proses perencanaan kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum. Dalam menyusun kurikulum harus dicermati dan dikaji secara baik tentang materi-materi yang berkaitan dengan nilai-nilai

¹²Mujiburrahman, *Pendidikan Sains Islami dan Pembentukan Karakter Bangsa*, (Banda Aceh, Prosiding Biotik, 2016), hal. 1.

moral, etika dan estetika menjadi konten yang dimasukkan dalam kurikulum. Atas dasar kebijakan ini, perguruan tinggi memiliki nilai-nilai yang ditawarkan (*espoused values*) dalam implementasi kurikulum dimaksud.

b. Keteladanan.

Keteladanan merupakan hal klasik dalam mencapai keberhasilan pendidikan karakter. Tumpuan keteladanan berada pada pundak para pengajar (dosen), upaya tersebut tidak hanya melalui penanaman nilai-nilai dalam ruang kuliah, melainkan nilai itu juga tampil dalam diri para dosen (*uswatun hasanah*) dalam kehidupan nyata di luar ruang kuliah yang dapat dicontoh dan sekaligus menjadi model bagi para mahasiswa. Karakter para dosen biasanya menjadi suritauladan yang dapat mempengaruhi coraka kepribadian mahasiswa dalam proses pendidikan di perguruan tinggi.

c. Menentukan Prioritas.

Perguruan tinggi mesti merumuskan dan menetapkan standar karakter yang akan diberikan dan diterapkan bagi kalangan mahasiswa yang menjadi dimasukkan detail dalam perencanaan dan program kerja universitas. Standarisasi dan urgensi capaian nilai pendidikan karakter ini harus disusun secara baik, tranfaran, tegas dan mesti dipahami oleh stakeholder universitas, mahasiswa, orang tua, bahkan masyarakat secara umum.

d. Praksis Prioritas.

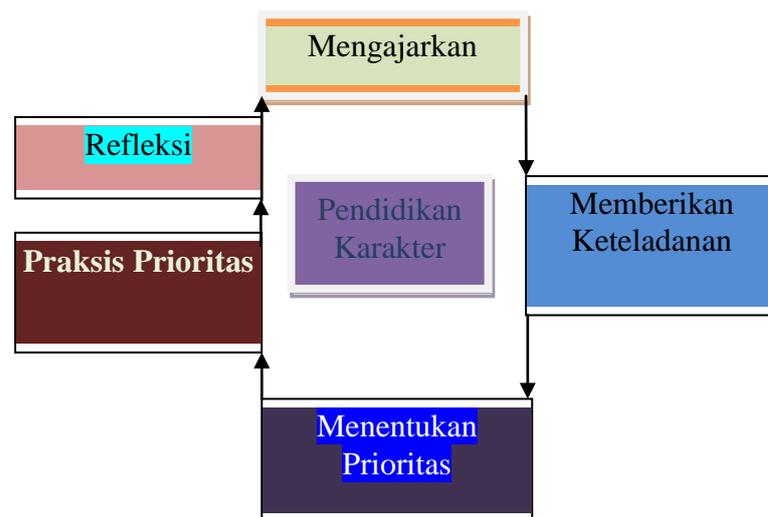
Pelaksanaan pendidikan karakter mesti adanya verifikasi dan croscek di lapangan sebagai bukti dilaksanakan program pendidikan karakter secara tepat dengan muatan utama pada penanaman nilai yang menjadi prioritas untuk dimplementasikan. Verifikasi tentang karakter yang dituntut, misalnya berkaitan bagaimana sikap universitas terhadap pelanggaran nilai yang telah ditetapkan. Realisasi berupa sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan nilai-nilai harus diberlakukan secara adil, transparan dan konsisten.

e. Refleksi.

Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap eksistensi nilai utama yang ingi dicapai secara kontinu dan konsisten. Jadi, setelah adanya upaya tindakan dan praktek pendidikan karakter secara riil di lapangan, perlu diadakan evaluasi untuk menilai dan menganalisa efektifitas dan tantangan dalam melaksanakan pendidikan karakter. Evaluasi sebagai alat ukur untuk

memperbaiki dan menyempurnakan program pendidikan karakter, sehingga dapat meningkatkan kemajuan pada masa depan berdasarkan pengalaman yang telah berlangsung pada perguruan tinggi tersebut.¹³

Kelima hal tersebut di atas, dinamakan oleh Koesoema sebagai siklus lingkaran dialektis dinamis yang saling keterkaitan dan berputar secara sinergi untuk menggapai kemajuan. Konsep ini merupakan konsep mikro tentang metode implementasi pendidikan karakter. Gambaran kelima aspek tersebut sebagaimana terdapat dalam skema di bawah ini:



Gambar 1. Metodologi Pendidikan Karakter

Hampir senada dengan Doni Koesoma, Ratna Megawangi sebagaimana dikutip oleh Bambang Q. Anees dan Adang Hambali¹⁴ menyatakan untuk pengembangan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui empat metode, yaitu:

- a. *Knowing the good* (mengetahui kebaikan).
- b. *Loving the good* (mencintai kebaikan).
- c. *Desiring the good* (menginginkan kebaikan).
- d. *Acting the good* (mengerjakan kebaikan).

Sedangkan mengenai grand design pendidikan karakter dalam lingkup makro merupakan sistem pendidikan yang mengacu kepada sistem pendidikan

¹³Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter...*, hal. 212-217

¹⁴Bambang Q. Anees dan Adang Hambali, *Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur'an*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 107.

yang holistik. Dalam kaitan ini, T. Ramli (2003) yang dikutip dalam Buku Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama, menerangkan bahwa pendidikan karakter mempunyai substansi dan tidak jauh berbeda dengan dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya tidak lain adalah mendidik, menempa dan membentuk kepribadian siswa/mahasiswa sebagai pribadi yang luhur dan agung, sebagai bagian anggota masyarakat dan warga Negara yang baik. Oleh karena itu, hakikat dan substansi dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama dan budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.¹⁵

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal yang absolut (bersumber dari agama dan budaya) yang juga disebut sebagai *the golden rule*. Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:

- (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, & (18) Tanggung Jawab.¹⁶

Proses pendidikan karakter tersebut akan memperoleh hasil yang maksimal jika mendapat perhatian yang serius oleh ketiga pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah/perguruan tinggi dan masyarakat. Ketiga lembaga ini harus berjalan secara sinergis dalam menanam karakter atau nilai-nilai yang luhur kepada anak atau peserta didik.¹⁷ Proses ini akan menjadi lebih lengkap jika didukung sepenuhnya oleh perangkat pendukung lainnya, seperti kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, lingkungan yang kondusif, infrastruktur, serta komitmen pemangku kepentingan di seluruh lapisan

¹⁵T Ramli dalam, Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2011, hal. 15. Dikutip dari: <http://aguswuryanto.file.wordpress.com/2011/12/1-pendidikan-karakter-ok.pdf>.

¹⁶Ketut Ngurah Artawan, S.Pd.,M.Pd., *Pendidikan Karakter*, dalam <http://karyatulis-smpn3selat.blogspot.com/2013/02/pendidikan-karakter.html>

¹⁷Mohd. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), hal. 5.

masyarakat. Grand design pendidikan karakter yang melibatkan seluruh komponen dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2. Grand Design Pendidikan Karakter¹⁸

Pelaksanaan dan implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara sinergi oleh berbagai pihak tidak lain adalah bertujuan karakter dasar pada diri mahasiswa, sehingga memiliki kualitas spritual dan moral yang lebih baik. Secara spesifik Arismantoro¹⁹ mengemukakan ada 9 karakter dasar yang ingi dicapai dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi, yaitu: a)cinta kepada Allah, alam raya beserta isinya, b)tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, c)Jujur, d)hormat dan santun, e)kasih sayang, peduli, dan kerjasama, f)percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, g)keadilan dan kepemimpinan, h)Baik dan rendah hati, dan i)toleransi, cinta damai dan persatuan.

3. Pendidikan Karakter di Aceh

Dalam konteks keacehan, pendidikan karakter sejalan dengan kebijakan dan sistem pendidikan yang berbasis syariat Islam, sebagai wujud dari bahagian dan isi dari implementasinya syariat Islam itu sendiri. Penerapan syariat Islam di provinsi Aceh didasari kepada Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Pada pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa

¹⁸Kementrian Pendidikan Nasional, Tim Pendidikan Karakter, *Grand Design Pendidikan Karakter*, dikutip dari: <https://aguswuryanto.wordpress.com/2011/01/21/grand-design-pendidikan-karakter/>

¹⁹Arismantoro, *Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hal. 29.

“keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah”.²⁰

Implementasi syariat Islam tentunya bersifat multi dimensi, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bidang pendidikan. Khusus mengenai bidang pendidikan, pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pendidikan daerah telah menetapkan melalui Qanun (Perda) nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan ini dijalankan dalam rangka mengakomodir dan mengimplementasikan sistem pendidikan yang berlandaskan Syariat Islam di negeri ini. Hal ini sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan bahwa “Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang berdasarkan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai Sosial Budaya Daerah serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam”.²¹

Beranjak dari sistem pendidikan tersebut disusun tujuan pendidikan di Aceh sebagaimana tertuang dalam pasal 4 disebutkan bahwa:

“Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan Negara”. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 bahwa “Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan”.²²

Mencermati substansi isi Qanun pendidikan dimaksud, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan dalam sistem pendidikan di Aceh, yaitu: *pertama*, sistem pendidikan nasional tetap menjadi patron dan standar dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh, artinya seluruh proses pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan pendidikan mesti sejalan dan berada dalam bingkai sistem pendidikan Nasional. *Kedua*, aspek sosial budaya

²⁰Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di kutip dari <http://wcv.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11513.pdf>

²¹Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun No. 23 tahun 2002, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, tahun 2002, hal. 3. dikutip dari: www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_23_2002.pdf

²²Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun No. 23 tahun 2002...* hal. 4. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_23_2002.pdf

(adat istiadat) dan seluruh nilai-nilai lokal (*local value*) atau kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi potensi daerah yang patut dihargai dan menjadi bahagian dalam mewarnai sistem dan isi pendidikan di Aceh. *Ketiga*, syariat Islam harus dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan pendidikan. Seluruh aspek pendidikan yang dilaksanakan di Aceh mesti dijiwai serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Ketiga aspek tersebut kiranya terimplementasi dalam seluruh sistem pendidikan yang berlangsung di Aceh, baik pada lembaga pendidikan informal, formal dan non formal, serta di berbagai jenjang pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. Pada sisi lain, seluruh perguruan tinggi yang di Aceh, memiliki peluang yang cukup besar dalam mengimplementasi pendidikan karakter di tingkat universitas. Peluang dan kesempatan ini kiranya benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua universitas di daerah ini, sehingga pada masa mendatang, Aceh dapat menjadi model pendidikan karakter bagi mahasiswa yang akan dijadikan contoh oleh berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia.

Kebijakan dan program pendidikan karakter di perguruan tinggi di Aceh sejalan dengan: 1) substansi nilai karakter yang diajarkan kepada para mahasiswa sesuai dengan ajaran Islam, 2) pendidikan karakter yang diajarkan oleh para dosen yang mumpuni dan memiliki keteladanan (*uswatun hasanah*) yang tinggi.

PENUTUP

Pendidikan karakter menjadi bahagian penting yang patut diutamakan dan mendapat prioritas untuk dipikirkan dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk oleh pihak perguruan tinggi. Sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab moral, sudah sepatutnya perguruan tinggi di Aceh secara khusus dan perguruan tinggi lainnya secara umum di Indonesia, memikirkan, melaksanakan dan mengembangkan paradigma dan system pendidikan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Mengingat pendidikan karakter yang berbasis syariat Islam menjadi penting dan sekaligus sebagai solusi alternative di tengah tidak berdayannya system pendidikan nasional dalam membentuk karakter bangsa.

Melalui model pendidikan berbasis syariat Islam yang teraktualisasi dalam proses pendidikan secara total dan menyeluruh di keluarga, sekolah/perguruan tinggi dan masyarakat, memberi ruang dan kesempatan yang luas untuk membentuk karakter dan kepribadian anak (mahasiswa) sesuai dengan tuntutan nilai-nilai Islam. Sehingga pada akhirnya, orientasi dan tujuan akhir aktifitas pendidikan untuk mewujudkan individu (pribadi

muslim) dan anggota masyarakat (komunitas muslim) yang memiliki kualitas keimanan yang tinggi, berakhlak mulia, berkarakter, berilmu dan profesional dapat dicapai.

Pada sisi lain, pendidikan sains dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif dan sistematis dalam rangka membangun dan memperkuat karakter bangsa (*character building*). Hal ini memungkinkan dilakukan dan bukan isapan jempol semata, mengingat salah satu fungsi pendidikan adalah membentuk watak dan karakter bangsa serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki setiap warganya dalam rangka mencerdaskan bangsa. Konsekuensi logis ini, maka seyogyanya paradigm dan konsep pendidikan sains islami yang dikembangkan di Indonesia mesti berdasar kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bermuara pada ketauhidan dan *rahmatan lilalamin* serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal keindonesian, demi melahirkan generasi bangsa yang beragama, berkarakter dan berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anees, B. Q., & Hambali, A. (2008). *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Al-Chaidar. (1998). *Reformasi prematur: jawaban Islam terhadap reformasi total*. Jakarta: Darul Falah.
- Arismantoro (2008), *Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hernowo. (2004). *Self Digesting: Alat Menjelajahi dan Mengurai Diri*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Kementrian Pendidikan Nasional, Tim Pendidikan Karakter, *Grand Design Pendidikan Karakter*, dikutip dari: <https://aguswuryanto.wordpress.com/2011/01/21/grand-design-pendidikan-karakter/>
- Ketut Ngurah Artawan, S.Pd.,M.Pd., *Pendidikan Karakter*, dalam <http://karyatulis-smpn3selat.blogspot.com/2013/02/pendidikan-karakter.html>
- Koesoema, D. (2007). *Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global*. Jakarta: grasindo.
- Latif, Y. (2009). *Menyemai karakter bangsa: budaya kebangkitan berbasis kesastraan*. Penerbit Buku Kompas.
- Mohd. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta: Lkis, 2009..
- Mujiburrahman, M. (2015). *Development Of Education In Post Tsunami Aceh*. *Kompetensi*, 6(2).

- Mujiburrahman, M. (2016). *Pendidikan Sains Islami dan Pembentukan Karakter Bangsa*, Banda Aceh: Prosiding Biotik
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Suwito, U. (2008). *Tinjauan berbagai aspek character building: Bagaimana mendidik anak berkarakter*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun No. 23 tahun 2002, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2002*: www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_23_2002.pdf
- T Ramli dalam, Kementrian Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2011, hal. 15.
Dikutip dari: <http://aguswuryanto.file.wordpress.com/2011/12/1-pendidikan-karakter-ok.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di kutip dari <http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11513.pdf>
- Widiastono, T. D. (2004). *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zohar, D., & Marshall, I. (2007). *SQ-Kecerdasan Spiritual*. Mizan Pustaka.